PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

# INSPEKTORAT DAERAH

## LAPORAN HASIL EVALUASI
## SAKIP

## DINAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
## KABUPATEN BLORA

NOMOR : 700/ 032 / rhs
TANGGAL : 21 JULI 2021

IRBAN WILAYAH : III

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
**INSPEKTORAT DAERAH**
Jl. GOR No.11 Blora Telp.(0296) 533266 Fax (0296) 533266
BLORA - 58219

Blora, 21 Juli 2021

Nomor : 700 /032
Lamp. : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2021

Kepada :
Yth. Kepala BKD
Kabupaten Blora
di –
**BLORA**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN & RB RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permen PAN & RB RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Blora Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, dengan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora dengan tujuan:
   a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
   b. menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
   d. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:
   a. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), terdiri dari:
      - Rencana Strategis/Renstra (10%);
      - Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)
   b. Pengukuran Kinerja (Bobot 25%);

- Pemenuhan Pengukuran (5%)
- Kualitas Pengukuran (12,5%)
- Implementasi Pengukuran (7,5%)

c. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%);
- Pemenuhan Pelaporan (3%)
- Kualitas Pelaporan (7,5%)
- Pemanfaatan Pelaporan (4,5%)

d. Evaluasi Internal (Bobot 10%);
- Pemenuhan Evaluasi (2%)
- Kualitas Evaluasi (5%)
- Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%)

e. Capaian Kinerja (Bobot 20%).
- Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
- Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
- Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora memperoleh nilai sebesar 81,41 dengan kategori BB atau Memuaskan.

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Blora dengan rincian sebagai berikut :

   a. Perencanaan Kinerja

      Hasil evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapat nilai 29.10 dari bobot 30%. Evaluasi atas perencanaan kinerja meliputi penilaian atas 2 (dua) sub komponen sebagai berikut :

      1) Perencanaan Strategis/Renstra

         Hasil evaluasi atas Perencanaan Strategis memperoleh nilai 9.70 dari bobot 10% Penilaian atas Perencanaan Strategis meliputi 3 sub komponen, yaitu :
         - Pemenuhan Renstra memperoleh nilai 2,00 dari bobot 2%
         - Kualitas Renstra memperoleh nilai 5.00 dari bobot 5%

- Implementasi Renstra memperoleh nilai 2,75 bobot 3%

Renstra Badan Kepegawaian Daerah visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran. Selain itu, sebagian besar tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra- Badan Kepegawaian Daerah telah berorientasi hasil dan telah selaras dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Blora.

Hal yang perlu diperhatikan adalah :

- Dokumen Rencana Strategis (Renstra) belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), rencana kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). (c.20)
- Dokumen Rencana Strategis (Renstra) belum direviu secara berkala (c.22)

2) Perencanaan Kinerja Tahunan/RKT

Hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai 19,40 dari bobot penilaian sebesar 20%.

Penilaian atas Perencanaan Kinerja Tahunan meliputi 3 sub komponen, yaitu :

- Pemenuhan RKT memperoleh nilai 4,00 dari bobot 4%
- Kualitas RKT memperoleh nilai 10,00 dari bobot 10%
- Implementasi RKT memperoleh nilai 5,40 bobot 6%

Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) telah ada dan telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja tahunan yang akan dicapai. Dokumen Penetapan Kinerja disusun segera setelah anggaran disetujui dan telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, target kinerja tahunan yang akan dicapai, program kegiatan dan pagu anggaran.

Hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan berkaitan dengan Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu :

- Belum ada dokumentasi/dokumen pendukung Rencana Aksi dalam pelaksanaan pemantauan pencapaian secara berkala terhadap Dokumen Penetapan Kinerja (PK). (c.17)

- Belum ada dokumentasi/dokumen pendukung bahwa Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan (c.18).

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,50 dari bobot penilaian sebesar 25%. Evaluasi atas pengukuran kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen sebagai berikut :

1) Pemenuhan Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub komponen pemenuhan pengukuran memperoleh nilai sebesar 4,38 dari bobot sebesar 5%. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan atas pemenuhan pengukuran adalah belum memadainya mekanisme pengumpulan data kinerja. Perlu dibuat SOP yang dilengkapi dengan pengumpulan data kinerja yang up to date, termasuk prosedur yang jelas jika terjadi kesalahan data.

2) Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub komponen kualitas pengukuran memperoleh nilai sebesar 12,19 dari bobot sebesar 12,5%. Hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan atas kualitas pengukuran adalah bahwa pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan karena belum ada mekanisme/ SOP pengumpulan data yang memadai.

3) Implementasi Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan pengukuran mendapat nilai sebesar 5,94 dari bobot sebesar 7,5%. Hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan atas pemanfaatan pengukuran adalah :

- Indikator Kinerja Utama (IKU) belum direviu secara berkala.(III.19)

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,85 dari bobot penilaian sebesar 15%. Evaluasi atas pelaporan kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen sebagai berikut :

1) Pemenuhan Pelaporan

Hasil evaluasi atas sub komponen pemenuhan pelaporan mendapat nilai sebesar 3.00 dari bobot sebesar 3%. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora telah menyusun LKJiP–OPD disampaikan kepada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Blora tepat waktu.

2) Kualitas Pelaporan

Hasil evaluasi atas sub komponen penyajian informasi kinerja mendapat nilai sebesar 6,25 dari bobot sebesar 7,5%. Hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan atas penyajian informasi kinerja yaitu

- dokumen LKJiP–OPD belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan (II.8).
- dokumen LKJiP–OPD belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya (II.9).

3) Pemanfaatan Pelaporan

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan informasi kinerja mendapat nilai sebesar 3,60 dari bobot sebesar 4,5%. Hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan atas pemanfaatan informasi kinerja adalah :

- bahwa informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan (III.13)
- bahwa informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi (III.14)
- bahwa informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam peningkatan kinerja organisasi (III.15)
- bahwa informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, peningkatan kinerja organisasi dan penilaian kinerja (III.16).

d. Evaluasi Internal

Hasil penilaian terhadap Evaluasi Kinerja memperoleh nilai 6,96 dari bobot penilaian sebesar 10%. Evaluasi atas evaluasi kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen sebagai berikut :

1) Pemenuhan Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub komponen pemenuhan evaluasi memperoleh nilai sebesar 1,84 dari bobot sebesar 2%. Dindukcapil Kabupaten Blora telah melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, namun sepenuhnya dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi yang telah dilakukan (I.4).

2) Kualitas Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub komponen kualitas evaluasi memperoleh nilai sebesar 3,25 dari bobot sebesar 5%. Hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan atas kualitas evaluasi adalah

- Hasil evaluasi internal belum memberikan penilaian atas akuntabilitas kinerja unit-unit kerja organisasi (II.6)
- Evaluasi program belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka penilaian keberhasilan program (II.8)
- Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya dalam rangka mengendalikan kinerja (II.10)

3) Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan evaluasi memperoleh nilai sebesar 1,88 dari bobot sebesar 3%. Hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan atas pemanfaatan evaluasi adalah

- hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dokumen perencanaan (III.13)
- hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja.(III.15)

e. Capaian Kinerja

Hasil evaluasi atas Capaian Kinerja Organisasi memperoleh nilai 9,17 dari bobot penilaian sebesar 20% Evaluasi atas pencapaian sasaran/kinerja organisasi

meliputi penilaian atas 2 (dua) sub komponen sebagai berikut :

1) Kinerja yang dilaporkan (output)

   Hasil evaluasi atas sub komponen kinerja yang dilaporkan *(output)* memperoleh nilai sebesar 3,75 dari bobot sebesar 5%. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah informasi mengenai capaian kinerja keluaran *(Output)* belum lebih baik dari tahun sebelumnya (e.2)

2) Kinerja yang dilaporkan *(outcome)*

   Hasil evaluasi atas sub komponen kinerja yang dilaporkan *(outcome)* memperoleh nilai sebesar 3,33 dari bobot sebesar 5%. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah informasi mengenai capaian target kinerja hasil *(Outcome)* belum sepenuhnya dapat dicapai.

3) Kinerja lainnya.

   Hasil evaluasi atas sub komponen kinerja lainnya memperoleh nilai sebesar 2.92 dari bobot sebesar 5%. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah belum sepenuhnya terdapat inovasi dalam manajemen kinerja.(e.9) dan penghargaan – penghargaan lainnya (e.10).

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

   a. Perencanaan Kinerja

      1) Perencanaan Strategis (Renstra)
         a) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) agar direviu secara berkala.
         b) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) agar digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

      2) Perencanaan Kinerja Tahunan
         a) Disusun dokumentasi/dokumen pendukung Rencana Aksi dalam pelaksanaan pemantauan pencapaian secara berkala terhadap Dokumen Penetapan Kinerja (PK)

b) Disusun dokumentasi/dokumen pendukung bahwa Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

b. Pengukuran Kinerja

1) Membuat SOP yang dilengkapi dengan metode pengumpulan data kinerja yang up to date, termasuk prosedur yang jelas jika terjadi kesalahan data.

2) Indikator Kinerja Utama (IKU) supaya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, penilaian kinerja dan IKU direviu secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

1) Dokumen LKJiP agar menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja Perangkat Daerah.

2) Dokumen LKJiP agar menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan.

3) Informasi yang disajikan dalam LKJiP agar digunakan dalam perbaikan perencanaan, peningkatan kinerja organisasi dan penilaian kinerja.

d. Evaluasi Internal

1) Dalam rangka evaluasi internal, Badan Kepegwaian Daerah Kabupaten Blora agar membentuk tim untuk melakukan pemantauan dan dokumentasi mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, mengidentifikasikan, mencatat dan mengadministrasikan kemajuan kinerja.

2) Evaluasi akuntabilitas kinerja agar memberikan rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan serta membuat dokumentasi tentang penilaian atas akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja/ seksi.

3) Hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja agar dimanfaatkan untuk perbaikan dokumen perencanaan, program dan kegiatan, capaian kinerja dan pengukuran keberhasilan unit kerja.

4) Capaian Kinerja

Capaian target *output* dan target *outcome* serta kinerja lainnya yang telah ditetapkan agar dimaksimalkan, serta terdapat upaya peningkatan prestasi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

**An. BUPATI BLORA**
INSPEKTUR DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
INSPEKTORAT DAERAH

Drs. KUNTO AJI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630430 198907 1 001

**Tembusan Yth**:
1. Bupati Blora sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Blora